

EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SD NEGERI BANGUNREJO 2 YOGYAKARTA

THE EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE EDUCATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS IN PUBLIC ELEMENTARY SCHOOL BANGUNREJO 2 YOGYAKARTA

Oleh: Latifa Garnisti Rifani

Jurusan Pendidikan Luar Biasa, Universitas Negeri Yogyakarta

garnistirifani@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta, mencakup (1) mendeskripsikan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta sesuai atau tidak dengan delapan standar pendidikan inklusif yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian, standar kompetensi guru dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan, (2) mendeskripsikan berbagai hambatan dalam implementasi pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta, dan (3) solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala saat penyelenggaraan pendidikan inklusif. Penelitian ini merupakan penelitian jenis evaluasi program dengan pendekatan model Discrepancy (kesenjangan). Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta. Subjek penelitian adalah kepala sekolah, guru kelas 1-6, dan guru pembimbing khusus di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta belum sesuai dengan delapan standar pendidikan inklusif, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian, standar kompetensi guru dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan, (2) hambatan yang dihadapi adalah jumlah Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang tersedia masih kurang dan minimnya pemahaman guru reguler tentang pendidikan inklusif, dan (3) solusi yang dapat dilakukan guna mengatasi kendala tersebut adalah GPK memberikan dampingan konsultatif kepada guru reguler, serta GPK dan guru reguler melakukan kerjasama dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Kata kunci : *Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*

This study was aimed to evaluate the implementation of Inclusive Education in Public Elementary School Bangunrejo 2 Yogyakarta, included (1) describe the achievement level of Inclusive Education in Public Elementary School Bangunrejo 2 Yogyakarta according or not with the eight Inclusive Education standards namely content, processes, competency, assessment, teachers, infrastructure, management, and financing standards, (2) describe the various obstacles in the implementation of inclusive education in Public Elementary School Bangunrejo 2 Yogyakarta, and (3) solution that can be done to overcome obstacles when conducting inclusive education. This research was an evaluation research with discrepancy evaluation model approach. The research was conducted in Public Elementary School Bangunrejo 2 Yogyakarta. The subjects were the principal, homeroom teachers of grades 1-6, and guidance teachers in Public Elementary School Bangunrejo 2 Yogyakarta. The data was collected using questionnaires, interviews, observation, and documentation. The results showed that (1) the achievement level of inclusive education in Public Elementary School Bangunrejo 2 Yogyakarta have not been in according to the eight inclusive education standards namely content, processes, competency, assessment, teachers, infrastructure, management, and financing standards, (2) barriers faced is the number of guidance teachers available is still lacking and the lack of regular teachers understanding of the inclusive education, and (3) solution that can be done to overcome these obstacles were guidance teachers provide consultative to regular teachers, as well as regular teachers and guidance teachers cooperation in organizing the inclusive education.

Keywords : *Evaluation of the inclusive education implementation.*

PENDAHULUAN

Dalam amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditekankan bahwa pendidikan di Indonesia diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan memajemukan bangsa. Setiap warga negara dijamin dan mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Ini berarti bahwa tidak ada pengecualian bagi warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial.

Penyelenggara pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan (Pasal 130 ayat 2 PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan). Penyelenggaraan pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan kejuruan diselenggarakan secara inklusif. Di dunia internasional telah banyak langkah yang dilakukan untuk mewujudkan pendidikan inklusif. Lahirnya pendidikan inklusif sejalan dengan deklarasi PBB mengenai Hak Azasi Manusia (HAM), yaitu hak pendidikan dan partisipasi penuh bagi semua orang dalam pendidikan. Keberadaan pendidikan inklusif juga didukung oleh deklarasi yang disepakati oleh beberapa negara, termasuk Indonesia, antara lain adalah pernyataan Salamanca tahun 1994 mengenai hak setiap anak untuk mendapatkan

pendidikan dan pengakuan terhadap perbedaan minat, kemampuan, dan kebutuhan dalam belajar. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diadakan pada tahun 2006 telah mendeklarasikan hak-hak anak, dan ditegaskan bahwa semua anak berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.

Dengan memberi kesempatan yang sama kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan, berarti memperkecil kesenjangan angka partisipasi anak normal dengan anak berkebutuhan khusus. Di Indonesia, telah banyak sekolah yang menggunakan sistem pendidikan inklusif dalam penyelenggaraannya. Salah satu sekolah yang menggunakan sistem pendidikan inklusif dalam penyelenggaraannya adalah SD Negeri Bangunrejo 2. SD Negeri Bangunrejo 2 mampu menerima dan mengajar anak berkebutuhan khusus. Baik peserta didik dengan kelainan fisik, emosional, mental dan sosial.

Menjadi sekolah inklusif seperti SD Negeri Bangunrejo 2 membutuhkan berbagai hal yang berbeda dan pastinya mengalami kendala yang berbeda pula dengan sekolah umum lainnya. Setidaknya sekolah harus mempersiapkan berbagai akomodasi dan penyesuaian agar anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik tanpa mengacuhkan jenis hambatan belajar yang dialaminya. Dalam menyelenggarakan sistem pendidikan inklusif, sekolah inklusif perlu memperhatikan standar pelayanan minimum sekolah inklusif. Menurut

Tim ASB (2011 : 30-31) Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif tercermin ke dalam 8 (delapan) Standar Pendidikan Nasional, yaitu : Isi, Proses, Kompetensi Lulusan, Penilaian, Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan, Sarana Prasarana, Pengelolaan, dan Pembiayaan.

Sementara berdasarkan observasi awal di SD Negeri Bangunrejo 2, tantangan yang dihadapi antara lain :

Pertama, sekolah inklusif SD Negeri Bangunrejo 2 dalam melaksanakan pendidikan inklusif belum melakukan penyesuaian antara kurikulum dengan tingkat kemampuan anak berkebutuhan khusus yang seharusnya tercermin dalam PPI. Kedua, peran GPK di sekolah tidak begitu besar, hanya sebatas mendampingi atau mengakomodasi anak dalam pembelajaran. Ketiga, program evaluasi tidak mengukur kemampuan siswa ABK dengan tepat karena penilaian akhir hanya berdasarkan KKM. Keempat, sesuai dengan pernyataan di atas bahwa guru tidak melakukan modifikasi dalam pelaksanaan pembelajaran, berarti bahwa guru juga tidak menggunakan media ataupun metode pembelajaran yang dapat mengakomodasi anak berkebutuhan khusus. Kelima, tidak imbangnya jumlah peserta didik berkebutuhan khusus dengan jumlah guru pembimbing khusus. Keenam, ketersediaan sarana prasarana yang aksesibel di sekolah inklusif SD Negeri Bangunrejo 2 masih minim.

Melihat banyaknya masalah dan ketidaksesuaian yang muncul dalam penyelenggaraan sistem pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2, di mana perlu dikaji kembali standar penyelenggaraan pendidikan inklusif dari sekolah tersebut. Serta melihat

selama ini belum pernah dilakukan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2. Dengan pertimbangan itulah peneliti tertarik untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2. Evaluasi dapat diartikan juga penilaian. Evaluasi atau penilaian adalah penentuan pencapaian tujuan suatu program. Penilaian merupakan suatu bentuk sistem pengujian dalam pelaksanaan program evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh kesesuaian penyelenggaraan pendidikan inklusi di SD Negeri Bangunrejo 2.

Dengan evaluasi, bertujuan untuk mengetahui secara mendalam apakah terdapat kesenjangan dalam implementasi penyelenggaraan sekolah inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2 dengan kriteria standar pelayanan minimum sekolah inklusif. Berangkat dari pemikiran ini maka evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2 menjadi penting untuk dilakukan guna memperoleh gambaran perbandingan pencapaian program dengan standar mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi SD Negeri Bangunrejo 2 sesuai dengan standar pelayanan minimum sekolah inklusif.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi yang dilakukan untuk mendapatkan informasi menyeluruh tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2. Model evaluasi yang digunakan adalah model evaluasi *discrepancy* yang dikembangkan oleh *Provus*. Alasan peneliti menggunakan model evaluasi *discrepancy* adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menginterpretasikan data secara jelas dan rinci tentang implementasi

penyelenggaraan pendidikan inklusif, faktor penghambat penyelenggaraan, dan bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2.

Model ini merupakan suatu prosedur *problem-solving* untuk mengidentifikasi kelemahan dan untuk mengambil tindakan korektif. Dengan model ini, proses evaluasi pada langkah-langkah dan isi kategori sebagai cara memfasilitasi perbandingan capaian program dengan standar untuk digunakan sebagai kebijakan di masa depan. Argumentasi *Provus*, bahwa semua program memiliki daur hidup (*life cycle*). Karena program terdiri atas langkah-langkah pengembangan, aktivitas evaluasi banyak diartikan adanya integrasi pada masing-masing komponennya.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di SD Negeri Bangunrejo 2 yang merupakan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Sejak tahun 2012 SD Negeri Bangunrejo 2 ditetapkan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Adapun alasan kenapa SD Negeri Bangunrejo 2 yang dipilih sebagai tempat penelitian, karena lokasi sekolah yang mudah dijangkau dan SD Negeri Bangunrejo 2 yang sudah 4 tahun menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, namun belum pernah dilakukan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2016.

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah sumber tempat diperolehnya data dan keterangan penelitian. Yang dimaksud dengan subjek menurut Spradley (dalam Basrowi dan Suwandi, 2008 : 188) adalah sumber informasi. Maka

subjek yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berada di SD Negeri Bangunrejo 2 yang terdiri dari kepala sekolah, guru dan guru pembimbing khusus (GPK).

Prosedur

Penelitian evaluasi standar pelayanan minimum pendidikan inklusi dilakukan melalui beberapa tahap sesuai dengan evaluasi model kesenjangan. Tahapan-tahapannya yaitu :

- 1) Mengembangkan suatu desain dan standar-standar yang menspesifikasi karakteristik implementasi. Kriteria standar nasional penyelenggaraan pendidikan inklusif yang digunakan disusun dengan mempertimbangkan kajian teori, karakteristik program yang dievaluasi, dan standar pelayanan minimum pendidikan nasional yang terdiri dari 30 indikator.
- 2) Model evaluasi yang digunakan adalah evaluasi model kesenjangan (*dyscrepancy*). Implementasi penyelenggaraan program pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta dibandingkan dengan kriteria delapan Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif.
- 3) Menjaring kinerja objek evaluasi meliputi pelaksanaan dan hasil penelitian. Penyelenggaraan pendidikan inklusif ini dilihat dari 8 Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian, standar kompetensi guru dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.
- 4) Mengidentifikasi ketimpangan-ketimpangan atau kesenjangan-kesenjangan antara kriteria

Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif dengan hasil pelaksanaan program pendidikan inklusif oleh SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta kemudian menentukan rasio kesenjangan.

- 5) Menentukan penyebab kesenjangan antara kriteria standar pendidikan inklusif dengan implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta.
- 6) Menghilangkan kesenjangan dengan membuat perubahan-perubahan terhadap pelaksanaan program pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta. Perubahan yang dimaksud adalah solusi yang dapat dilakukan oleh sekolah agar mencapai kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan: 1) Kuesioner, 2) Wawancara, 3) Observasi, dan 4) Dokumentasi.

1. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2013 : 199). Kuesioner menjadi teknik pengumpulan data yang utama berupa pertanyaan yang terdiri dari 42 pertanyaan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pertanyaan kuesioner ini merupakan penjabaran dari Standar Pelayanan Minimum (SPM) sekolah inklusif yang terdiri dari 30 indikator yang mencakup 8 Standar Nasional Pendidikan, yaitu standar isi, proses, kompetensi lulusan, penilaian,

kompetensi guru dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Sumber informasinya adalah kepala sekolah, guru wali kelas 1-6 dan guru pembimbing khusus (GPK) di SD Negeri Bangunrejo 2.

2. Observasi

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013 : 203) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Observasi dilaksanakan untuk mengetahui proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru wali kelas dan GPK, serta untuk mengetahui ketersediaan sarana prasarana yang menunjang aksesibilitas ABK. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pembelajaran di dalam kelas ketika guru sedang mengajar dan mengamati secara langsung ketersediaan dan penggunaan sarana prasarana yang menunjang aksesibilitas ABK.

3. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2013 : 194). Wawancara dilakukan bertujuan untuk memperoleh informasi tambahan mengenai pelaksanaan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta dan *cross check* kesesuaian data yang telah didapat.

4. Dokumentasi

Menurut Basrowi dan Suwandi (2008 : 158), metode dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber dokumen yang mendukung dalam penelitian. Metode dokumentasi ini digunakan untuk meneliti benda-benda tertulis, arsip-arsip, dokumen-dokumen yang dimiliki SD Negeri Bangunrejo 2 meliputi dokumen sekolah mengenai sejarah berdirinya sekolah, RPS, RAPBS/RAKS, prestasi belajar ABK, STTB dan data-data lain yang mendukung pelaksanaan standar pelayanan minimum sekolah inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menelaah semua data yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jenis data atau informasi yang diperoleh selama wawancara, observasi dan dokumentasi dapat berupa data kuantitatif dan kualitatif. Data yang diperoleh dengan membandingkan Kriteria pendidikan inklusif ideal dengan pelaksanaan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2.

Data dari hasil kuesioner, observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dilakukan penskoran atau penilaian. Menurut Riduwan (2011 : 89) hasil penskoran dianalisis dengan

menggunakan metode analisis deskriptif presentase. Tujuan penggunaan metode analisis deskriptif presentase adalah untuk memberikan gambaran ketercapaian pelaksanaan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2. Rumus deskriptif presentase (kuantitatif) adalah sebagai berikut :

$$DP = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

DP = Deskriptif Presentase

n = Skor empiric (skor yang diperoleh)

N = Skor ideal

Tabel 1. Kriteria Pencapaian

No.	Rentang	Keterangan
1.	76 – 100%	Sangat Baik
2.	51 – 75%	Baik
3.	26 – 50%	Cukup Baik
4.	0 – 25%	Kurang Baik

HASIL PENELITIAN

Menurut tingkat pencapaian secara umum, SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta memperoleh skor 78.49 %. Sedangkan tingkat kesenjangan SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta dalam pencapaian kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif sebesar 21.51 %.

Pelaksanaan kriteria standar pelayanan minimum sekolah inklusif komponen penilaian standar isi memenuhi indikator pencapaian sebesar 66.25 %. Pengembangan kurikulum adaptif dan RPI dilakukan oleh guru pembimbing khusus. Dikarenakan tidak sebandingnya jumlah GPK dan ABK di SD Negeri Bangunrejo 2

Yogyakarta, maka pengembangan kurikulum adaptif dan RPI bagi seluruh ABK tidak mampu dipenuhi oleh GPK.

Pelaksanaan kriteria standar pelayanan minimum sekolah inklusif komponen penilaian standar proses memenuhi indikator pencapaian sebesar 66.25 %. SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta selalu melakukan asesmen awal setiap tahun ajaran baru bagi peserta didik baru, siswa pindahan dan siswa yang sekiranya membutuhkan asesmen ulang. SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta menerapkan pengubahan setting kelas 2 kali dalam setahun atau dalam setiap semester. Setting kelas yang biasanya sekolah gunakan adalah setting kelas U dan setting *teater*. Sekolah tidak selalu melaksanakan kurikulum adaptif dan/atau RPI yang telah disusun sebelumnya.

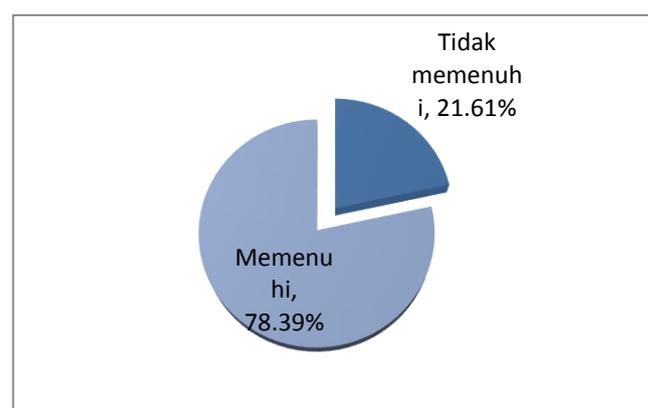
Guru reguler hanya sesekali membawa materi belajar tambahan bagi anak berkebutuhan khusus, selebihnya disamakan dengan anak normal lainnya. Strategi mengajar yang guru gunakan belum sesuai dengan seluruh jenis anak berkebutuhan khusus. Tidak semua ABK mendapatkan pendampingan teman sebaya, hal ini dikarenakan sebagian besar ABK sudah mampu bersosialisasi dan mengikuti pembelajaran dengan baik tanpa perlu pendampingan.

Pelaksanaan kriteria standar standar pelayanan minimum sekolah inklusif komponen penilaian standar kompetensi lulusan memenuhi indikator pencapaian sebesar 88.125 %. SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta telah meluluskan siswa ABK selama 2 tahun dengan tingkat kelulusan 100 % baik UN dan/atau USEK. Sedangkan untuk program pengembangan

bakat dan kompensatoris bagi ABK, SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta telah mampu melaksanakannya. Namun program yang dilaksanakan belum disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing ABK, program masih disamaratakan dengan anak normal.

Pelaksanaan kriteria standar ideal pendidikan inklusif komponen penilaian standar penilaian memenuhi indikator pencapaian sebesar 83.75 %. SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta telah menetapkan secara khusus SKL dan KKM bagi beberapa ABK. SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta telah 2 tahun menerbitkan atau memberikan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) kepada setiap ABK yang lulus USEK. GPK rutin memberikan laporan perkembangan ABK setiap harinya kepada guru kelas. Namun guru kelas hanya melaporkan perkembangan ABK kepada orangtua murid 2 kali dalam setahun atau setiap pembagian rapor.

PEMBAHASAN



Gambar 1. Diagram Ketercapaian Kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta

Berdasarkan tingkat pencapaian secara umum, keterlaksanaan kriteria standar pelayanan

minimum oleh SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta mencapai 78,39 % dengan kesenjangan sebesar 21.61 %. Adanya tingkat kesenjangan sebesar 21.61 % dalam pelaksanaan kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif dapat diartikan bahwa ada hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta.

Pada standar isi, pelaksanaan kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif komponen penilaian standar isi memenuhi indikator pencapaian sebesar 66.25 %. Hal ini disebabkan tidak sebandingnya jumlah GPK dan ABK di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta, maka pengembangan kurikulum adaptif dan RPI bagi seluruh ABK tidak mampu dipenuhi oleh GPK. Kenyataan yang peneliti temui di SD Negeri Bangunrejo 2 ini sesuai dengan pernyataan N. Praptiningrum (2010:38) yang menyatakan bahwa secara umum ketersediaan tenaga pendidik masih belum sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif, karena sebagian sekolah inklusif belum memperoleh dukungan guru pembimbing khusus maupun tenaga ahli. Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna, karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik (Prastiyono, 2013 : 125). Tidak sebandingnya jumlah GPK dengan ABK di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta yaitu 3 orang GPK dengan 61 orang ABK, berakibat pada tidak dapat terlaksananya pengembangan kurikulum adaptif dan RPI bagi setiap ABK. Karena tidak seluruh siswa berkebutuhan khusus mendapatkan kurikulum adaptif dan RPI membuat sebagian besar anak

berkebutuhan khusus yang tidak mendapatkan kurikulum adaptif dan RPI, tidak mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan belajar anak.

Merujuk pada standar proses, kondisi saat ini SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta dalam kapasitasnya sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif belum mencapai standar proses dari kriteria standar pelayanan minimum sekolah inklusif. Pelaksanaan kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif komponen penilaian standar proses memenuhi indikator pencapaian sebesar 66.25 %. Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan standar proses adalah kurangnya peran guru. Baik GPK maupun guru reguler dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Menurut Dieni Laylatul Zakia (2015 : 113) Faktor tenaga pendidik (guru) memiliki peran yang sangat besar dalam pencapaian kualitas pendidikan secara umum. Sehingga kurangnya peran guru dalam temuan penelitian ini berdampak besar dalam proses penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta. Faktor penghambat yang muncul pada standar proses tidak jauh berbeda dengan standar kompetensi guru dan tenaga kependidikan, serta standar pengelolaan di mana permasalahan berorientasi pada kurangnya pemahaman guru maupun sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan standar kompetensi guru dan tenaga kependidikan adalah kurangnya peran guru baik GPK maupun guru reguler dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif disebabkan kurangnya pemahaman guru kelas tentang

pengajaran terhadap ABK dan pendidikan inklusif itu sendiri. Sedangkan permasalahan dalam pelaksanaan kriteria standar pelayanan minimum sekolah inklusif komponen standar pengelolaan adalah pelaksanaan kebijakan sekolah dalam hal pengulangan kelas di mana ABK disamakan dengan anak normal. Permasalahan ini disebabkan kurangnya pemahaman guru maupun sekolah terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Apabila dilihat dari temuan-temuan di lapangan, penyebab kurangnya pemahaman guru bukan terletak pada kurangnya pelatihan mengenai pendidikan inklusif, melainkan pada kurangnya kolaborasi antara guru kelas dan GPK dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Sehingga guru kelas tidak memiliki pengetahuan mengenai penerapan pendidikan inklusif itu sendiri. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sunanto dalam Dieni Laylatul Zakia (2015:112) di antaranya menyatakan bahwa: (1) pada awalnya pembelajaran diterima oleh guru kelas, kini bergeser pada ketergantungan pada guru khusus atau guru pendamping. Hal ini menyebabkan kurangnya peran guru dalam pembelajaran bagi ABK. (2) motivasi, kerjasama dalam mengatasi masalah tidak tampak dan tidak dilakukan melalui kolaborasi sebab seluruh aktivitas belajar ABK dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi diserahkan sepenuhnya kepada guru pendamping. Seyogyanya, guru di sekolah inklusif saling berkolaborasi dalam pelaksanaan program pembelajaran. Sesuai dengan pendapat Sukinah, (2010:45) bahwa guru bekerja dalam tim, guru dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumber daya lain dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi. Sehingga dengan adanya kolaborasi antara guru dengan tim interdisipliner, pembelajaran yang diberikan tidak terkotak-kotak antara anak normal dan anak berkebutuhan khusus melainkan menerapkan pembelajaran terpadu berdasarkan hasil kolaborasi tim interdisipliner. (3) guru pendamping yang berkualifikasi PLB belum memiliki keberanian untuk meluruskan sesuai konsepnya.

Pelaksanaan kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif komponen penilaian standar kompetensi lulusan memenuhi indikator pencapaian sebesar 88.125 %. Hal ini dikarenakan program pengembangan bakat yang dilaksanakan belum disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing ABK, program masih disamaratakan dengan anak normal. Seyogyanya program pengembangan bakat bagi anak berkebutuhan khusus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing anak sesuai dengan tujuan pendidikan inklusi itu sendiri. Menurut Paramita Isabella, dkk, (2014 : 55) Pendidikan inklusif juga bertujuan untuk membangun keterampilan dan bakat alamiah yang dimiliki peserta didik. Tentunya keterampilan dan bakat alamiah yang dimiliki masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus berbeda-beda. Sehingga program pengembangan bakat seharusnya disesuaikan dengan potensi masing-masing ABK.

Pelaksanaan kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif komponen penilaian standar penilaian memenuhi indikator pencapaian sebesar 83.75 %. Kesenjangan terletak pada guru kelas yang hanya melaporkan perkembangan ABK kepada orangtua murid 2 kali dalam setahun

atau setiap pembagian rapor. Laporan perkembangan ABK seharusnya dilaksanakan secara rutin. Menurut Permendiknas No 20 Tahun 2007 laporan hasil belajar perlu disampaikan kepada peserta didik dan peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedi. Karena anak harus mengetahui nilai hasil belajar yang didapatnya sehingga anak mengetahui sejauh mana kemampuannya pada saat itu. Selain itu dengan anak mengetahui nilai hasil belajarnya, anak dapat menyiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran remedial apabila nilai yang didapat tidak mencapai KKM. Pemberian nilai hasil belajar kepada siswa maupun orangtua ini juga dapat memotivasi siswa untuk dapat meningkatkan kemampuannya dan membuat orangtua dapat mengetahui kemampuan dan perkembangan anak serta memotivasi anak dalam belajar.

Pelaksanaan kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif komponen penilaian standar sarana prasarana memenuhi indikator pencapaian sebesar 75 %. Kesenjangan terletak pada minimnya ketersediaan sarana prasarana dan alat peraga atau media pembelajaran di sekolah. Hal ini dapat disebabkan dengan kurangnya dana dan/atau kurangnya kecakapan sekolah dalam mengelola sarana prasarana yang dibutuhkan sekolah. Berkaitan dengan penggunaan dana, hal ini merujuk kepada pelaksanaan kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif komponen penilaian standar pembiayaan. Komponen penilaian standar pembiayaan memenuhi indikator pencapaian sebesar 90.84 %. SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta hanya mendapatkan dana dari Dinas dan tidak mendapatkan dana

tambahan dari luar atau dari lembaga swasta. Dikarenakan pihak sekolah tidak berjejaring atau dengan LSM atau lembaga swasta di luar Pemerintah. Menurut Sukinah (2010 : 47) harus ada keterlibatan dan partisipasi orangtua, masyarakat, dan LSM yang lebih luas; harus ada *supporting system*. Dengan adanya kerjasama antara sekolah dengan LSM, maka bertambahlah partisipan pendukung pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta. Sehingga dapat membantu mendukung ketersediaan sarana prasarana pendidikan inklusif dan program-program pendidikan inklusif di sekolah.

Berdasarkan kendala yang muncul, diketahui bahwa hambatan utama dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta adalah jumlah GPK yang tersedia masih kurang dan pemahaman yang guru reguler miliki tentang pendidikan inklusif masih minim. Menurut Purwandari (2009) : 7), perlu penyamaan persepsi tentang pendidikan inklusif dari semua elemen, sehingga memiliki pemahaman yang tidak jauh berbeda, dan dapat menyelenggarakan sekolah inklusif dengan prosedur dan langkah yang jelas. Selain itu, hambatan lainnya adalah rendahnya kerjasama antara guru kelas dengan GPK. Purwandari (2009 : 7) menjelaskan bahwa perlu dikembangkan kolaborasi antar tim kerja profesional, sehingga dalam menangani ABK dapat diperoleh solusi yang menguntungkan bagi ABK. Dari pendapat di atas menjelaskan bahwa solusi yang tepat dalam mengatasi kendala yang muncul di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta adalah memberikan pemahaman kepada guru reguler mengenai pendidikan inklusif. Salah satu caranya adalah GPK memberikan dampingan konsultatif kepada guru reguler, serta GPK dan guru reguler melakukan kerjasama dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah diadakan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta belum sesuai dengan delapan standar pendidikan inklusif, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian, standar kompetensi guru dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan,

2. Kendala Pelaksanaan Pendidikan Inklusif

Jumlah Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang tersedia masih kurang dan minimnya pemahaman guru reguler tentang pendidikan inklusif.

3. Solusi/Masukan guna Pencapaian Kriteria Standar Nasional Pendidikan Inklusif

GPK memberikan dampingan konsultatif kepada guru reguler, serta GPK dan guru reguler melakukan kerjasama dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Saran

Dari hasil penelitian mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi ABK di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta, dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi DIY bidang PLB, diharapkan untuk menyediakan GPK langsung dari SLB agar dapat menjadi pendamping konsultatif bagi guru reguler.

2. Bagi Kepala Sekolah

Bagi kepala sekolah, diharapkan dapat meninjau ulang kebijakan pengulangan kelas bagi ABK. Selain itu, diharapkan kepala sekolah dapat mengadakan pertemuan orangtua ABK secara rutin guna melaporkan perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus.

3. Guru Kelas dan GPK SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta

Bagi SD Negeri Bangunrejo 2 diharapkan untuk guru reguler bisa bekerjasama dengan GPK dalam merancang dan mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ABK. Serta mengadakan dampingan konsultatif dari GPK kepada guru reguler.

DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Dieni Laylatul Zakia. (2015). *Guru Pembimbing Khusus (GPK) : Pilar Pendidikan Khusus*. Surakarta : *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan USMS*.
- N. Praptiningrum. (2010). *Fenomena Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta : *Jurnal Pendidikan Khusus Vol. 7 No. 2*.
- Paramita Isabella, dkk. (2014). *Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di SDN 131/IV Kota Jambi*. Jambi : *Tekno-Pedagogi Vol. 4 No.2*.
- Permendiknas Tentang Standar Penilaian Pendidikan. Jakarta : BSNP.
- Prastiyono. (2013). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif. Surabaya : *Jurnal Administrasi Publik Vol. 11 No. 1*.
- Purwandari. (2009). *Pendidikan Inklusif : Masalah Ketenagaan dan Peran Serta*

Perguruan Tinggi Dalam Penyelenggaraan Sekolah Inklusif. Yogyakarta:UNY.

Riduwan. 2011. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula.* Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung : Alfabeta.

Sukinah. (2010). *Manajemen Strategik Implementasi Pendidikan Inklusif.* Yogyakarta : Jurnal Pendidikan Khusus Volume 7 No. 2.